



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PROF. DR. SUYONO, M.SI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UNIVERSITAS**
3. NHK : **180669**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.342.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
3. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 526.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 321.000.000
6. Tanah Seluas 2.212 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 231.000.000
7. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
8. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 124.100.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000



2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
23.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 293.300.900

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.922.000.900

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.922.000.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.